



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Polemik Kampung Susun Bayam

Stefanus Ato

Warga Kampung Susun Bayam terancam kehilangan hak mereka menempati hunian susun yang telah diperjuangkan bertahun-tahun. Beragam dokumen yang dikantongi warga selama proses alot pembangunan Jakarta International Stadium tak berarti.

"Kami akan kembali lagi ke Balai Kota DKI Jakarta. Hak kami untuk tinggal di Kampung Susun Bayam semakin tidak jelas. Rumah susun itu kalau bukan untuk kami, lalu untuk siapa," kata M Furkhon (46) tentang nasib mereka yang kini diabaikan pemerintah daerah, sebelum menutup panggilan telepon, Selasa (1/8/2023) malam.

Furkhon merupakan satu dari 123 keluarga yang telah mendapat nomor unit hunian di rumah susun di dalam kawasan olahraga Jakarta International Stadium (JIS) itu. Daftar calon penghuni Kampung Susun Bayam sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wali Kota Jakarta Utara sejak 22 Agustus 2022. Namun, proses selanjutnya untuk menghuni kampung susun terhambat.

Warga awalnya antusias untuk segera menghuni kampung susun itu ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, meresmikan hunian susun tersebut menjelang akhir masa jabatannya pada 12 Oktober 2022. Namun, setelah tampak kekuasaan pimpinan DKI berganti, hak warga menghuni kampung susun kian menjauh.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda), selaku pengelola kampung susun, awalnya berjanji kepada warga untuk menghuni rumah susun itu pada November 2022. Namun, janji itu tak kunjung ditepati.

Pernyataan dari Jakpro setelah itu berubah-ubah, mulai dari persoalan perizinan, administrasi, tarif hunian, hingga rencana pengalihan pengelolaan dari Jakpro ke Pemprov DKI.

Janji itu masih tinggal janji. Hingga detik ini, warga yang telah terdaftar sebagai calon penghuni Kampung Susun Bayam masih bertahan di hunian sementara, mengontrak, dan sebagian lagi tinggal di sejumlah rumah susun milik Pemprov DKI.

Korban janji

Hunian yang kini berdiri kokoh di Kampung Susun Bayam tak dibangun dengan instan. Ada proses panjang mulai dari dialog, negosiasi, hingga musyawarah yang kerap berujung perang saraf antara warga dan pemangku kepentingan.

Menurut Furkhon, kawasan yang kini berubah jadi JIS itu dulu merupakan lahan milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan warga sebagai hunian, kebun, dan tambak ikan. Warga di sana sekitar 600 keluarga. Mereka berasal dari beragam latar belakang dan daerah di Indonesia.

Lahan yang sudah mereka tempati sejak puluhan tahun lalu itu terusik ketika Pemprov DKI berencana membangun megaprojek JIS pada 2019. Di sini negosiasi bermula. "Kami berdasarkan kontrak sosial. Dalam kontrak sosial itu, tidak ada pengusuran, melainkan penataan," ujar Furkhon.

Kontrak sosial untuk menata warga Kebon Bayam itu ditandatangani Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 2017. Keseriusan pemerintah daerah makin mewujud saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung untuk pertama kali ke sana pada 9 April 2018.

Dari dokumen yang dikan-

tongi warga Kebon Bayam, pimpinan daerah DKI saat itu berkomitmen bahwa selain menata permukiman warga, mereka didampingi agar berdaya. Komitmen itu masih terlihat selama proses pembangunan JIS.

Tawaran rusun

Komitmen Pemprov DKI kini berubah. Warga yang sudah terdaftar sebagai calon penghuni Kampung Susun Bayam justru ditawarkan bermukim di Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyoningrum, sesuai rapat kerja dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7), menyampaikan, pemerintah daerah menyiapkan Rusun Nagrak bagi warga Kampung Bayam yang ingin pindah. Unit rusun telah siap huni.

Pernyataan Retno kembali berubah saat wawancara khusus bersama *Kompas*, Jumat (14/7). Retno menyebutkan, pengelolaan Kampung Susun Bayam terus dibahas dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku pengelola. Pemerintah daerah mengupayakan jalan keluar yang terbaik bagi warga agar ada kepastian atau polemik tak berlarut.

"Sedang dikomunikasikan dengan Jakarta Propertindo. Tetapi kami tawarkan, jika ingin segera menghuni, sudah kami siapkan di Rusun Nagrak," ucap Retno.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, melihat polemik Kampung Susun Bayam tak lepas dari janji politik tak terwujud seiring pergantian kepemimpinan. Janji politik itu tidak terwujud karena si-

fatnya tak mengikat atau tak ada dasar hukumnya.

"Sewaktu-waktu dapat berganti tergantung siapa yang memimpin. Tentu saja setiap pemimpin punya pertimbangan melanjutkan program yang baik. Jika tidak, maka distop," tutur Trubus, Minggu (30/7).

Menurut Trubus, pengelolaan Kampung Susun Bayam tak tuntas karena diresmikan di pengujung masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Hal itu berbeda dengan Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara yang jadi rujukan warga Kampung Bayam.

Di Akuarium, kesepakatan pengelolaan dengan pemerintah untuk jangka waktu tertentu tercatat hitam di atas putih meskipun kampung berdiri di lahan yang masuk kawasan cagar budaya. Pembangunan Akuarium terlaksana selama kepemimpinan Anies.

"Itulah beban politik. Dalam kasus Kampung Bayam, tak ada kewajiban untuk melanjutkan program," ujarnya.

Trubus mencontohkan beberapa program hasil janji politik yang penuh dinamika sampai sekarang. Penataan kawasan Plumpang di Jakarta Utara, alih-alih relokasi, misalnya, bagus dari segi kebijakannya, tetapi berbahaya karena kawasan itu dekat dengan Depo Pertamina Plumpang. Kebakaran pada Maret silam jadi peringatan berharga bagi seluruh warga akan bahaya yang bisa timbul dari hunian tak tertata di sekitar instalasi strategis.

Proyek pembangunan fasilitas jalan layang non-tol di Pluit, Jakarta Utara, pun mangkrak hingga kini. Proyek itu bergulir tahun 2015 saat masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Selanjutnya, program Rumah DP 0 Rupiah. Kini namanya berganti Hunian Terjangkau Milik. "Harusnya ada edukasi kepada warga agar bersiap-siap dengan segala kemungkinan dari janji politik," kata Trubus.

Trubus pun berharap, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, sebagai birokrat lebih berani mengambil kebijakan. Hal itu karena Penjabat Gubernur tak punya beban janji politik. Apalagi sosoknya punya hubungan erat dengan pemerintah pusat.